

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	Jateng Pos
Media Online

Wilayah: Kabupaten Batang

Halaman 6

PT Budikarya Bisa Diblacklist

BATANG – Proyek penataan trotoar dan drainase Jalan Wahidin, Kecamatan Batang, terancam gagal selesai. Peralnya, progres pengerjaan paket konstruksi tersebut mengalami keterlambatan. Jika tak selesai, maka PT Budikarya Tama Intiarta selaku pelaksana pekerjaan bisa di blacklist.

Mestinya, proyek senilai Rp 4 M yang mulai dikerjakan per 27 Juni 2019 lalu bisa rampung pada 23 November

2019. Sayang, saat ini progresnya baru terealisasi sekitar 60 persen. "Progres pekerjaan masih mencapai 60 persen. Artinya rekanan terlambat menyelesaikan pekerjaan," ujar Kabid Prasarana Jalan dan Jembatan DPUPR Kabupaten Batang, Nur Haryanto, Kamis (21/11).

DPUPR telah menawarkan kesempatan perpanjangan waktu kepada rekanan untuk penyelesaian pekerjaan. Namun, hingga saat ini pihak rekanan

belum juga memberikan jawaban. "Bila rekanan mengambil masa perpanjangan, maka rekanan akan menerima denda sepermil dari nilai kontrak per hari. Tiap harinya rekanan harus membayar denda Rp 3 juta," jelasnya.

Telatnya proyek penataan trotoar dan drainase Jalan Wahidin diduga akibat rekanan mengalami kesulitan modal. "Intinya rekanan ini mengalami kesulitan modal, sehingga tenaga kerja yang ada

di lapangan hanya sedikit dan material tidak mencukupi," ujar Kepala DPUPR Kabupaten Batang, Ir Ketut Mariadji.

DPUPR telah melakukan evaluasi dan melayangkan surat peringatan satu dan dua kepada rekanan. Bahkan, Bupati Batang, H Wihaji juga meninjau langsung pengerjaan proyek. Saat itu, Bupati tampak kesal pada pelaksana proyek. Peralnya, progres pekerjaan jauh dari target yang ada dalam kontrak kerja. "Saya kecewa. Proyek ini pagu anggarannya Rp 4 M dan di kawasan perkotaan, tapi progresnya jauh dari yang seharusnya," tukas Bupati Wihaji. (jpnn/dik)